

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI DESA**

**(Studi Kasus di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung
Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**Disusun oleh
DOROTEA MARISTIN
19520050**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI DESA**

**(Studi Kasus di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung
Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**SKRIPSI
APMD**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

**DOROTEA MARISTIN
19520050**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023

ii



HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juni 2023

Pukul : 11:00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dr. Supardal, M. Si

Ketua Penguji/pembimbing

Dr. Adji Suradji Muhammad, Sos., M. Si

Penguji samping I

Dr. Analius Giawa, S. IP., M. Si

Penguji samping II

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Ruel Samaloisa, S. Sos., M. Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dorotea Maristin

Nim : 19520050

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA**”, dengan studi di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewah Yogyakarta adalah benar-benar hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan saya rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Dorotea Maristin
19520050

MOTTO

“If God is making you wait, then be prepared to receive more than what you asked for. (Jika Tuhan membuatmu menunggu, percayalah dan bersiaplah untuk menerima lebih dari apa yang kamu minta)”.

“Work hard in silence, let success be your noise. (Bekerja keras dalam diam, dan biarkan sukses menjadi kebisinganmu)”
(Frank Ocean)

“Jangan minta kepada Tuhan apa yang menurutmu baik, tetapi mintalah kepadanya apa yang menurut dia baik bagimu”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji serta syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan perantaraan Bunda Maris atas berkat, perlindungan dan tuntunan-nya selama ini sehingga saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini. Dengan rasa tulus dan penuh kebanggaan, karya ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada semua orang yang senantiasa mendukung penyelesaian Skripsi ini dengan caranya masing-masing:

1. Terima kasih teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Nikolaus Durman dan Ibu Magdalena Tumung atas semua doa, penguatan, dorongan dan semangat yang tiada henti yang diberikan kepada saya sepanjang waktu terkhusus dukungan yang sangat luar biasa selama pengerjaan Skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Supardal, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membantu membimbing dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
3. Terima kasih kepada adik-adik saya Nofliana Lidia, Tekla Valninda Iman, Keluarga besar saya Hendrikus dan Keluarga besar Andreas yang sudah memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Terima kasih kepada teman-teman saya Veranda, Fenti Peoot, Ayu, Fira, Risna Meng, Mecok, Viani, Ceklin Batumali, Jeanis Kuniawati, kk prilos, Firlan Suryadi, Erick Jansen, Adven Kaka, Brian Bastista, Geris Santur, Tri Jehabut. yang sudah memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala perlindungan, berkat, dan Rahmat yang tidak berkesudahan sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Srata 1 Ilmu Pemerintahan.

Tentu saja terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Kalurahan “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis belajar, berproses dan menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Dr. Supardal, M.Si. selaku Dosen pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Seluruh Karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Kalurahan “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi penulis.

5. Bapak Sudarta selaku Lurah Kalurahan Jepitu tempat penulis melakukan penelitian dan Bapak Rahman selaku sekretaris Kalurahan yang membantu saya dalam proses penelitian di lapangan.
6. Ibu Heni dan Ibu Sari yang selalu membantu penulis untuk mendapatkan informasi dan yang senantiasa menyemangati penulis.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan dalam dunia ilmiah dan akademik.

Yogyakarta ,9 Mei 2023

Penyusun

Dorotea Maristin
19520050

INTISARI

Berdasarkan UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) dan pembangunan Kawasan perKalurahan an. Dengan manfaat Sistem Infromasi Desa adalah salah satu upaya pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan pembangunan. Pemerintah Desa adalah kajian penting dalam program yang berkaitan dengan sistem informasi Kalurahan. Sistem Informasi Desa (SID) digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kerap muncul Ketika pengelola data Kalurahan seperti proses administrasi data Kalurahan, pengelolaan data, surat menyurat, serta pengelolaan data penduduk Kalurahan. Selain itu sistem informasi Desa (SID) dapat digunakan oleh perangkat Kalurahan untuk mendukung pengambilan keputusan perangkat Kalurahan serta sebagai masukan dalam perencanaan pengembangan Kalurahan.

Pemerintah Kalurahan Jepitu membangun Kalurahan melauai konsep yang mereka terapkan dengan melihat situasi perkembangan zaman yang mengharuskan membuat suatu perubahan yang mengikuti alur zaman, seperti memanfaatkan teknologi sebagai inovasi. Namun sekarang ada hambatan-hambatan yang dialami pemerintah Kalurahan Jepitu terkait dengan Sistem Informasi Desa. Dalam hambatan ini pengembangan Sistem Informasi Desa di Kalurahan Jepitu yang sudah ada jarang terupdate dan masyarakat kurang memahami apa itu sistem informasi Desa. Selain itu keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola dan kurang pengawasan dari pemerintah Kalurahan. Dalam hal ini aparatur kalurahan belum begitu mahir atau memahami tentang pengelolaan sistem informasi Desa dan masyarakat yang kurang mampu untuk memahami mengakses sistem informasi Desa yang ada di Kalurahan Jepitu.

Dalam Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik penentuan narasumber menggunakan Teknik purposive. Dalam subjek penelitian ini memiliki delapan (8) informan yang terbagi dalam pemerintah Kalurahan, Pengelola SID, dan Masyarakat kalurahan. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan Teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Mengenai hasil dari pembahasan dalam penelitian ini yaitu dalam pemanfaatan SID yang berbasis online ini sangat membantu warga untuk mendapatkan informasi atau berita tentang situasi Kalurahan, pembangunan, perkembangan Kalurahan dan berbagai pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan.

Kata kunci: Strategi Pemerintaha Kalurahan, Sistem Informasi Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Literatur Review	11
F. Kerangka Konseptual.....	24
1. Strategi	24
2. Pemerintah Desa	25
3. Pengembangan	27
4. Sistem Informasi Desa	28
5. Governing	30
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	34
H. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Unit Analisis	35
3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
4. Teknik Analisis Data.....	39

BAB II. PROFIL KALURAHAN JEPITU	41
A. Sejarah Kalurahan Jepitu	41
B. Kondisi Geografis Kalurahan Jepitu	42
C. Kondisi Demografis Kalurahan Jepitu	46
1. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	46
2. Jumlah Penduduk berdasarkan TINGKAT PENDIDIKAN	47
3. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan	48
4. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Agama	49
D. Keadaan Ekonomi dan Kesejahteraan Kalurahan Jepitu	49
E. Keadaan Sosial Budaya	51
F. Sarana dan Prasarana	52
1. Sarana dan Prasarana Transportasi	52
2. Prasarana Ibadah	53
3. Sarana Air Bersih	53
4. Sarana dan Prasarana Kesehatan	54
5. Sarana Lembaga Pendidikan	54
G. Organisasi Pemerintahan Kalurahan	55
BAB III. SID DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN MASYARAKAT	
.....Error! Bookmark not defined.	
A. Analisis kekuatan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui Sistem Informasi kalurahan	59
B. Analisis partisipasi Pemerintah Desa dalam memberikan informasi terhadap masyarakat dalam sistem Informasi Desa	66
C. Analisis pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	70
BAB IV. PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
PEDOMAN WAWANCARA	85
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Narasumber Penelitian	37
Tabel 2. 1 Daftar Gua di Kalurahan Jepitu	45
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kalurahan Jepitu berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan	48
Tabel 2. 5 Jumlah penduduk berdasarkan Agama	49
Tabel 2. 6 Jumlah data warga kurang mampu di Kalurahan Jepitu	50
Tabel 2. 7 Jumlah Sarana Ibadah	53
Tabel 2. 8 Jumlah sarana Pendidikan	55
Tabel 2. 9 struktur organisasi Pemerintahan Kalurahan Jepitu	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kalurahan Jepitu	43
Gambar 2. 2 Website BLT Dana Desa Kalurahan Jepitu	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan akibat kepada pemerintah Kalurahan untuk menjalankan otonomi Kalurahan. Di samping itu, adanya Undang-Undang tersebut secara tegas memberikan pengakuan bahwa pemerintah Kalurahan adalah penyelenggara pemerintah yang mengembangkan kemandirian dan berhak memanfaatkan segala sumber daya yang terdapat pada masing-masing Kalurahan. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas memberikan kekuatan bahwa pemerintah Kalurahan ditempatkan sebagai subjek dan bukan sebagai obyek dalam pembangunan. Selain itu, pemerintah Kalurahan sekaligus sebagai perencanaan pembangunan yang sesuai dengan potensi kebutuhan Kalurahan itu sendiri.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus memiliki kemampuan bekerja sama dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang dilembaganya. Untuk dapat menyelenggarakan roda pemerintahan diperlukan kapasitas aparatur pemerintah Kalurahan yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kalurahan

Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Sistem Infromasi Desa Nomor 70 Tahun 2019, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Kalurahan berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten.

Dalam Peraturan Daerah Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang dimaksud, kalurahan adalah nama lain dari Kalurahan yang merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem informasi Desa yaitu sistem pengelolaan data kewilayahan dan data kewargaan di Kalurahan yang disediakan oleh Kementrian Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisien pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategi pembangunan Desa.

Sebagai sebuah sistem yang mendorong pemerataan akses informasi dari dan untuk Kalurahan, sistem informasi Desa harus dapat dimanfaatkan secara optimal baik untuk keperluan internal yang dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat Kalurahan maupun untuk keperluan internal yang dapat menjawab kebutuhan dan permasalahannya masyarakat Kalurahan maupun untuk keperluan membuka jejaring eksternal dalam rangka memasarkan dan mengembangkan potensi Kalurahan secara lebih luas. Sebagai akibatnya, sumber daya manusia yang akan berperan sebagai pengelola sistem informasi Desa tentu tidak hanya dihadapkan pada persoalan penguasaan teknologi, pengelola memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi yang ada demi menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat Kalurahan. Kompetensi mengenai literasi media memainkan peran penting dalam menjembatani persoalan kebutuhan konsumsi dan penyebaran informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Masyarakat yang melek media akan memiliki kemampuan untuk mengakses media guna memenuhi kebutuhan mereka akan informasi terkait, mampu menerjemahkan isi media sesuai dengan konteks hidup dan kebutuhan lokal, mampu menimbang dan menakar kesahihan informasi yang dapat melalui media serta dapat pula memanfaatkan media untuk menyuarakan kebutuhan sekaligus memasarkan potensi lokal yang ada di Kalurahan, Kompetensi sumber daya manusia pengelola sistem informasi Desa mengenai literasi media mencerminkan peran penting dalam

menjebatani persoalan kebutuhan konsumsi dan penyebaran informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Literasi media menjadi isu yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang ada dalam masyarakat utamanya dalam konteks pembangunan dan pengelolaan sistem informasi Desa yang bernilai dan bermakna bagi masyarakatnya.

Sistem informasi Desa yang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat Kalurahan baik secara internal maupun secara eksternal memerlukan tidak hanya mendorong yang bersifat *top down*. Pengelolaan sistem informasi Desa yang efektif tentu dimulai dari harapan bahwasannya sistem informasi Desa akan membantu lebih baik, dan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat akan digerakan dan didorong agar mampu mengenali dan menggali potensi dirinya. Masyarakat melakukan sendiri kegiatannya mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan sekaligus mengawasi dan mengevaluasi kegiatan tersebut. Dengan demikian masyarakat harus berani bertindak secara terus menerus untuk memperbaiki kualitas dan taraf hidup dan martabat dirinya, keluarga, dan lingkungannya.

Pengelolaan sistem informasi Desa dan pemangku kepentingan di lingkungan Kalurahan Jepitu menemukan kendalanya sendiri, mengenali potensi dan mampu melakukan evaluasi diri secara proporsional agar menerapkan sistem informasi Desa akan bermanfaat secara optimal dan mendorong pada kemajuan dan kemakmuran Kalurahan. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki, membangun

keinginan dan motivasi yang kuat untuk memaksimalkan sistem informasi Desa.

Peran SID sangat penting dalam pengembangan informasi, transformasi, komunikasi dan sinergitas antar sistem. Pengembangan informasi akan menyediakan dokumen dan basis data Kalurahan, yang kemudian ditransformasikan untuk peningkatan pelayanan publik Dalam upaya mengembangkan komunikasi dua arah antara warga dengan pemerintah Kalurahan, akan terbangun ruang dan atau media aspirasi warga.

Berdasarkan Undang-Undang ITE No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan amanat Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan secara elektronik di Indonesia, menuntut setiap lembaga atau instansi publik untuk mengimplementasikan *e-Government* dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik. Kalurahan sebagai pemerintahan administratif terkecil di Indonesia (Asyikin, Fitri and Nugroho, 2015) yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari penerapan *e-government* di Indonesia (Mayowan, 2016), dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan mengimplementasikan *e-Government* dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik.

Deesa sebagai pemerintahan administratif terkecil di Indonesia (Asyikin, Fitri and Nugroho, 2015) yang bertugas untuk melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari penerapan *e-government* di Indonesia (Mayowan, 2016), dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan bagian dari implementasi *e-Government* yang merupakan alat bantu bagi Kalurahan untuk menyelesaikan permasalahan yang sering muncul pada saat pengelolaan data Kalurahan seperti administrasi Kalurahan, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan penduduk Kalurahan yang meliputi penduduk asli dan penduduk pendatang. Kalurahan berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Kalurahan yang telah dikembangkan. Sistem ini merupakan sistem informasi tepat guna dengan tujuan untuk memajukan masyarakat dengan mempermudah proses pengelolaan data di kantor Kalurahan. Saat ini telah dikembangkan banyak produk system informasi Kalurahan yang telah dikembangkan seperti ntara lain SIDeKA (Sistem Informasi Kalurahan dan Kawasan) yang diinisialisasi dan dikembangkan oleh BP2DK (Badan Prakarsa Pemberdayaan Kalurahan Dan Kawasan), dan SID (Sistem Informasi Kalurahan) yang dikembangkan oleh *Combine Institute* (Susanto dan Proboyekti, 2016) Pada penelitian ini akan dikembangkan sistem informasi Kalurahan yang dibuat berdasarkan kebutuhan Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul. Dalam pengembangan dan penerapan system informasi Kalurahan diperlukan beberapa faktor pendukung yaitu sumberdaya manusia yang memiliki keahlian minimal yaitu mampu

mengoperasikan computer dan beberapa aplikasi sederhana seperti mengoperasi website, *Microsoft office* (Susanto dan Proboyekti, 2016), selanjutnya faktor pendukung lainnya adalah financial dan fasilitas penunjang, Pengembangan SID ini diharapkan mampu memberikan inovasi bagi kantor pemerintahan Kalurahan khususnya Kalurahan Jepitu Kabupaten Gunung Kidul sehingga mampu meningkatkan kinerja perangkat Kalurahan ditinjau dari segi kualitas pelayanan terhadap masyarakat, produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan produktifitas.

Dalam pengembangan dan penerapan sistem informasi Kalurahan diperlukan beberapa faktor pendukung yaitu sumber daya manusia yang memiliki keahlian minimal yaitu mampu mengoperasikan computer dan beberapa aplikasi sederhana seperti mengoperasi website, *Microsoft office* (Susanto dan Proboyekti, 2016), selanjutnya faktor pendukung lainnya adalah financial dan fasilitas penunjang, Pengembangan SID ini diharapkan mampu memberikan inovasi bagi kantor pemerintahan Kalurahan Jepitu kabupaten Gunungkidul khususnya Kalurahan sehingga mampu meningkatkan kinerja perangkat Kalurahan ditinjau dari segi kualitas pelayanan terhadap masyarakat, produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan produktifitas.

Dalam permasalahan yang ada di Kalurahan Jepitu yaitu masyarakat kurang memahami apa itu sistem informasi Desa dan kanal media yang sudah ada di Kalurahan jarang terupdate padahal banyak sekali potensi yang ada dan bisa dikembangkan seperti pariwisata dan

budaya oleh masyarakat Jepitu. Selain itu keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola dan kurang pengawasan dari pemerintah Kalurahan. Dalam hal ini aparatur Kalurahan belum begitu mahir atau memahami tentang pengelolaan sistem informasi Kalurahan dan masyarakat yang kurang mampu untuk memahami mengakses Sistem Informasi Kalurahan yang ada di Kalurahan Jepitu.

Dengan adanya masalah tersebut diharapkan bagaimana usaha pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan sistem informasi yang ada di Kalurahan Jepitu. Tujuan yaitu agar seluruh masyarakat yang ada di Kalurahan Jepitu dapat mempromosikan potensi yang ada di Kalurahan mereka, mengingatkan di Kalurahan jepitu terdapat banyak potensi-potensi pariwisata dan budaya yang harus di kembangkan dan di promosikan oleh masyarakat Kalurahan jepitu supaya potensi wisata dan budaya dapat dikenal oleh banyak orang melalui sistem informasi Desa (SID) tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan Elisabet Lestari (2017) menyatakan bahwa pengelolaan sistem informasi Desa di Kalurahan Dlingo sudah dilaksanakan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal. Dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prisila W Silalahi (2018) menyatakan bahwa pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan (SID) dalam Kalurahan Bangunjiwo sudah menyediakan tim khusus untuk mengelolanya sehingga berita tentang Kalurahan dapat cepat di update ke

website kalurahan, facebook dan instagram jadi masyarakat tidak perlu menunggu lama seperti waktu lalu yang masi manual, dengan adanya Sistem Informasi Kalurahan (SID) dapat mempermudah pemerintah kalurahan dalam memberikan informasi yang lebih cepat dan transparan.

Di Kalurahan Jepitu, Kepanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul mampu memberikan pelayanan dan informasi yang efektif, Pemerintah Kalurahan Jepitu membangun Kalurahan melalui konsep yang mereka terapkan, dengan melihat situasi perkembangan zaman yang mengharuskan membuat suatu perubahan, yang mengikuti alur zaman, seperti memanfaatkan teknologi sebagai inovasi. Dengan informasi-informasi yang positif yang disampaikan, sehingga dari situ sistem informasi Kalurahan sangat baik dan harus diterapkan di Pemerintahan Kalurahan, Namun sekarang pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan Jepitu warga dapat mengakses dan melihat data melalui *website* Kalurahan, dalam *website* tersebut terlihat pemberian informasi kurang update termasuk didalam pengelolaan. Selain itu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dan kurang pengawasan dari pemerintah Kalurahan. Pemanfaatan Kalurahan SID memerlukan pengelolaan data dan informasi yang lebih baik dan harus selaras dengan perkembangan sarana dan kapasitas pemerintah Kalurahan. SID dapat dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan, akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik oleh pemerintah Kalurahan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan sistem informasi Desa (SID) di Kalurahan Jepitu. Peliti ingin mendalami apakah layanan dalam sistem informasi Desa ini bermanfaat bagi masyarakat yang dimana dalam hal ini masyarakat sebagai penerima manfaat dari adanya sistem informai Desa, layanannya cepat dan dapat seHINGA lebih efektif dan efisien, serta ingin melihat sejauh mana Pemerintah Kalurahan Jepitu mampu mengelola dan memanfaatkan sistem informasi Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas bahwa rumusan masalahnya adalah Bagaimana sistem informasi Desa dalam pengembangan sistem informasi Desa di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan strategi pemerintah Desa dalam pengembangan sistem informasi Desa (SID) di Kalurahan Jepitu.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat atau mendukung dalam pelaksanaan strategi pemerintah Desa dalam sistem informasi Desa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap ilmu dan pengetahuan pendidikan khususnya mengenai kapasitas Kalurahan dalam Strategi pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)
2. Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi pemerintah Desa dalam mengelola dan memanfaatkan Sistem Pemerintah Desa.

E. Literatur Review

Pada bagian ini berisikan tinjauan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Sistem Informasi Desa. Penelitian yang akan dilakukan memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, dalam jurnal Rahimi Fitri, dkk (2017) yang berjudul “PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA (SID) BERBASIS TIK” hasil dari penelitian ini sebagai salah satu alat bantu bagi perangkat Kalurahan dalam melayani masyarakat merupakan bagian dari

implementasi e-Government sebagaimana yang tertuang dalam Amanant Inpres No 6 Tahun 2021 tentang telematika dalam pemerintahan dan inpres No 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan secara elektronok di Indonesia. SID digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kerap muncul Ketika pengelolaan data Kalurahan seperti proses adminitrasi data Kalurahan. pengelolaan data surat menyurat, serta pengelolaa data penduduk Kalurahan. Perangkat Kalurahan serta sebagai masuan dalam perencanaan pembangunan Kalurahan. Sistem ini diharapkan dapat dignakan oleh Kalurahan sehingga terbentuk tata Kelola pemerintahan Kalurahan yang baik (good governance)

Pengembangan SID dalam penelitian ini dengan menerapkan tahapan metode siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau istilah lainnya adalah *softwater development life cycle* (SDILC) dengan tahapan analisis, perancangan, pengkodean, uji coba dan implementasi.

Pengembangan SID ini diharapkan dapat memberikan inovasi bagi kantor pemerintahan Desa untuk dapat meningkatkan kkerja perangkat Kalurahan ditinjau dari segi kualitas pelayanan terhadap masyarakat, produktiitas, responsivitas, responsibilitas dan produktivitas.

Penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu membahas tentang pengembangan sistem informasi Desa. penelitian diatas lebih menekankan pada pengembangan sistem informasi Desa berbasis TIK, sedangkan

dalam penelitian ini lebih menekankan bagaimana strategi pemerintah Desa dalam pengembangan sistem informasi Desa.

Kedua, dalam jurna Hermayanti, Yuyu (2022) yang berjudul “STRATEGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEBSITE DI KABUPATEN CIAMIS” penelitian ini dilatar belakangi dari adanya permasalahan bahwa belum berjalan secara optimal. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman oleh perangkat Kalurahan terkait sistem informasi Desa dalam minimnya sumber daya manusia yang ada di Kalurahan dalam mengoprasikan website Kalurahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untk mengetahui bagaimana strategi Dinas Komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan sistem informasi Desa berbasis website di kabupaten Ciamis. Metode penelitian ini mengunkanan kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini bahwasannya strategi dinas komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa Berbasis Website Kabupaten Ciamis secara keseluruhan dari adanya sosialisasi sudah berjalan baik namun belum optimal. Sosialisasi dilakukan seperti bekerjasama dengan DPMD, Fisip Universitas Galus maupun dengan pihak lain. Informasi yang disampaikan dengan Bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan pihak yang menjadi sasaran sosialisasi dapat dipahami oleh penerima. Tetapi masih banyak Kalurahan yang belum mempunya SID dikarenakan kondisi dan situasi Kalurahan tersebut.

Dalam penelitian diatas memiliki persamaan yaitu membahas tentang sistem informasi Desa, penelitian diatas lebih menekankan bagaimana strategi dinas komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan sistem informasi Desa berbasis website di kabupaten ciamis, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Desa dalam pengembangan sistem informasi Desa di Kalurahan Jepitu.

Ketiga, dalam jurnal Hartoyo, dkk (2016) yang berjudul “UPAYA MEMBANGUN SISTEM INFORMASI DESA YANG BERMAKNA” dalam penelitian SID diharapkan dapat mendorong kemajuan Kalurahan dengan mengoptimalkan potensi local. Warga Kalurahan Citali, Kapanewon Pmulihan, Kabupaten Sumedang dengan didampingi fasilitator dari tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Padjadjaran, memilih memanfaatkan platform blog yang tersedia gratis sebagai upaya persiapan dalam rangka memenuhi amanat UU Kalurahan. Karakteristik warga Kalurahan Citali yang terbuka sekaligus bangga pada identitas Kalurahan nya tercermin dalam partisipasi aktif sejak proses inisiasi dan pemilihan judul domain yang merepresentasikan identitas mereka. Karakteristik ini pun mengejawantah pada proses perencanaan dan produksi konten SID. Meski demikian, warga masih menghadapi berbagai kendala.

Selain persoalan teknis dan SDM, produksi konten SID belum berjalan lancar sehingga belum mengoptimalkan potensi local dan belum dapat menjawab kebutuhan riil warganya. Di lain pihak, potensi pemanfaatan SID ini akan bersinergi dengan upaya pemerintah untuk

mendorong pembentukan dan peberdayaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMDes) sebagai salah satu isitusi penggerak potensi ekonomi Kalurahan berada dalam payung hukum yang sama, yakni UU Kalurahan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya strategis dan sistematis untuk menjebatani idealita dan realita melalui kementrian antar pemangku kepentingan yang berlangsung sinegis dan berkelanjutan.

Penelitian di atas memiliki kesamaan membahas tentang sistem informasi Kalurahan, namun penelitian diatas lebih menekankan bagaimana upaya membangun sistem informasi Desa yang bermakna, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Kalurahan dalam pengembangan sistem informasi Kalurahan.

Keempat, dalam jurnal Abdul Shomad (2018) yang berjudul “IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN BEKASI” dalam penelitian ini, implementasi sistem informasi Desa bagi pemerintahan Kalurahan merupakan suatu keniscayaan. Kewajiban untuk menerapkan sistem informasi Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejatinya, sistem informasi Desa memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengakses data Kalurahan, pembangunan Kalurahan dan pembangunan Kawasan perKalurahan an. Pelaksanaan roda pemerintahan, program dan anggaran Kalurahan menjadi transparan. Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan pun menjadi lebih akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman Kepala Kalurahan atau Aparatur

Kalurahan dalam memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan dan seberapa serius Kepala Kalurahan atau Aparatur Kalurahan mengimplementasi Sistem Informasi Desa.

Hasil dari penelitian ini menemukan penerapan sistem informasi Desa belum sepenuhnya optimal. Masih ada Kalurahan yang tidak memiliki data Kalurahan dan tidak memberi akses kepada masyarakat untuk melihat anggaran, program kerja dan kebijakan Kalurahan lainnya. Bahkan lebih ironis lagi, masih ada aparat Kalurahan yang tidak tahu Undang-Undang Kalurahan meskipun hanya sekedar mendengar Namanya saja.

Penelitian di atas memiliki kesamaan yaitu membahas tentang sistem informasi Desa yang dimana penerapan sistem informasi Desa ini belum sepenuhnya optimal, penelitian di atas lebih menekankan implementasi sistem informasi Desa di kabupaten Bekasi, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan strategi pemerintah Desa dalam pengembangan sistem informasi Desa di Kalurahan Jepitu.

Kelima, dalam jurnal Fadjarini Sulistyowati, dkk (2013) yang berjudul “PARTISIPASI WARGA TERHADAP SISTEM INFORMASI DESA” dalam jurnal ini menjelaskan teknologi menjadi bagian dari upaya untuk memudahkan pendapatan Kalurahan. Salah satunya dari pemanfaatan teknologi di desa merupakan sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh *Combine Resource Institution (CRI)* di Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul. Dengan adanya Sistem

Infomasi Desa, keberadaan dan kelengkapan data di Kalurahan dapat didokumentasikan dengan lebih baik. Dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Sisten Informasi Desa di Kalurahan Terong Kabupaten Bantul. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yng menjadi sasaran adalah kehidupan social atau masyarakat sebagai satu kesantuan atau sebuah kesatuan yang menyeluruh.

Hasil dari penelitian ini didapatkan; partisipasi masyarakat terhadap keberadaan sistem informasi Desa diawali pada saat sistem ini diberlakukan, kemunculan partisipasi masyarakat karena adanya sinergitas yang antara aparat Kalurahan, LSM dan masyarakat, partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan dengan upaya mengontrol keberadaan sistem informasi Desa bagi masyarakat.

Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu membahas tentang sistem informasi Kalurahan, penelitian diatas lebih menekankan bagaimana partisipasi warga terhadap sistem infomasi Kalurahan, sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana strategi pemerintah Kalurahan dalam pengembangan sistem infomasi Kalurahan.

Keenem, dalam jurnal Mugi Praseptiawan (2021) yang berjudul “PELATIHAN SISTEM INFORMASI DESA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL PERANGKAT KALURAHAN TAMAN SARI” dalam jurnal ini menjelaskan kemampuan literasi digital perangkat Kalurahan merupakan aspek yang paling utama dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi sistem informasi Desa merupakan bagian kebijakan pemerintah Provinsi Lampung untuk penerapan *smart village*. Aplikasi sistem informasi Desa yang dikembangkan secara mandiri oleh pemerintah Kalurahan Taman Sari dan program studi Teknik informatika belum berjalan optimal, hal ini karena perangkat belum memahami penggunaan sistem informasi Kalurahan. Pelatihan penggunaan sistem informasi Desa dengan platform *Open SID* dibutuhkan oleh perangkat Kalurahan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital perangkat Kalurahan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital perangkat Kalurahan yang merupakan Kalurahan binaan program studi informatika. Metode yang digunakan penelitian ini pelatihan dan tutorial yang dilakukan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Hasil dari penelitian ini adalah peningkatan keterampilan dan pengetahuan perangkat Kalurahan setelah mengikuti seluruh rangkaian materi yang diberikan. Rekomendasi kegiatan disarankan untuk segera mengambil Tindakan yang lebih konkrit berupa implementasi kegiatan sistem informasi Desa dengan mendorong dikeluarkan peraturan Kalurahan tentang penerapan sistem informasi Kalurahan.

Penelitian diatas memiliki persamaan yaitu membahas tentang sistem informasi Desa, penelitian diatas lebih menekankan tentang pelatihan sistem informasi Desa untuk meningkatkan kemampuan literasi digital perangkat Kalurahan, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan

bagaimana strategi pemerintah Desa dalam pengembangan sistem informasi Desa.

Ketuju, dalam jurnal Fahrur Rozi, dkk (2017) yang berjudul “PENGEMBANGAN WEBSITE DAN SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG” dalam penelitian ini menjelaskan di era otonomi, Kelurahan merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan bersetujuan langsung dengan masyarakat terutama dalam pelayanan publik. Masalah yang timbul dan dihadapi adalah minimnya tingkat keterampilan aparatur Kelurahan dengan tuntutan masyarakat yang lebih dinamis serta sistem pengelolaan arsip masih bersifat konvensional memicu resiko tinggi. Sejalan dengan agenda reformasi dari kementerian pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa setiap individu dan organisasi dituntut untuk mengembangkan diri guna meningkatkan pelayanan masyarakat. Pengelolaan administrasi dan arsip yang konvensional harus diubah menjadi berbasis sistem dan digital.

Selain itu Kelurahan juga perlu mempublikasikan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi tentang Kelurahan, disamping perlu untuk memerlukan transparansi publik. Berkaitan dengan masalah tersebut, program pengabdian kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Bangoan ini memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan memberikan bantuan pengembangan website Kelurahan dan sistem

informasi Kalurahan untuk mengelola data di Kalurahan. Seklaigus pelatihan pengelolaan administrasi menggunakan sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterlampilan aparatur Kalurahan dengan memberikan *warkshop* dan sosialisasi Undang-Undang Tahun 2014.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan media untuk mempublikasikan segala potensi yang dimiliki Kalurahan, tertatanya pengelolaan administrasi yang telah berbasis digital serta meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparatur Kalurahan. Hasil dari penelitian ini berupa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.

Penelitian diatas memiliki persamaan yaitu membahas tentang sistem informasi Desa, penelitian di atas lebih menjelaskan tentang bagaimana pengembangan website dan sistem informasi Desa, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan strategi pemerintah Desa dalam pengembangan sistem informasi Desa.

Kedelapan, dalam jurnal Hari Saptaning Tyas (2021) yang berjudul “PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA (SID) UNTUK MEWUJUDKAN SMART VILLAGE DI KALURAHAN PANGGUNG HARJO DIY” dalam penelitian ini menjelaskan *smart village* merupakan Kalurahan yang secara inovatif mampu menggunakan teknologi informasi untuk mencapai peningkatan hidup, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, social dan lingkungan tanpa meniggalkan

factor-faktor yang mewujudkan smart village di kalurahan panggunharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan FGD, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan Teknik interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya factor-faktor yang mendorong terwujudnya *smart village* dengan pemanfaatan SID, yakni; keberadaan SID yang diinisiasi Kalurahan dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendataan Kalurahan yang lebih akurat dan sebagai media penyampaian informasi dan komunikasi, Prakarsa pemerintah Kalurahan dalam mendorong pemanfaatan inovasi teknologi informasi dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Kalurahan seperti pengelolaan sampah dari rumah tangga dan pewarisan budaya lokal melalui lumbung kebudayaan, SID mendorong relasi yang lebih baik antara pemerintah Kalurahan, masyarakat dan lingkungan untuk mendukung terwujudnya *smart village*.

Penelitian di atas memiliki kesamaan yaitu membahas tentang sistem informasi Kalurahan, penelitian di atas lebih menekankan pemanfaatan sistem informasi Desa untuk mewujudkan smart village di Kalurahan Panggunharjo Diy, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan strategi pemerintah Kalurahan dalam pengembangan sistem informasi Desa.

Kesembilan, dalam jurnal Wahy Nurvita Afnani, dkk (2020) yang berjudul "PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA (SID)

GUNA MENINGKATKAN GOOD GOVERNMENT DI KALURAHAN GONDOSULI KAPANEWON GONDANG KABUPATEN TULUNGANGUNG” dalam penelitian ini menjelaskan pengembangan sistem informasi Desa ini bertujuan meningkatkan *good government* di Kalurahan. Alasan Kalurahan Gondosulo dipilih untuk pengembangan Sistem informasi Desa dikarenakan selama ini belum optimal sebagai media integrative dalam membangun Kalurahan. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu dengan memberikan bimbingan teknis berupa penerapan pengisian data, serta evaluasi langsung kepada perangkat Kalurahan. Program Sistem Informasi Desa akan diluncurkan kepada masyarakat Kalurahan dengan cara sosialisasi melalui Rukun Tangga atau Rukun Warga maupun Karang Taruna.

Hasil dari penelitian ini adalah perangkat Desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa pengoperasian Sistem Informasi Desa dengan baik. Sehingga masyarakat Kalurahan setempat dapat lebih mudah dalam melakukan pengurusan administrasi melalui Sistem Informasi Kalurahan.

Penelitian di atas memiliki kesamaan yaitu membahas tentang pengembangan sistem informasi desa, penelitian di atas lebih menekankan pengembangan sistem informasi Desa guna meningkatkan *good government*, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Desa dalam pengembangan sistem informasi Desa.

Kesepuluh, dalam jurnal Muthmainna Ahmad (2018) yang berjudul “EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KALURAHAN MATA ALLO KABUPATEN ENREKANG” dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan sistem informasi desa dalam pembangunan Kalurahan termasuk segi pada segi ketetapan waktu, ketetapan biaya dan ketetapan sasaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimana semua data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sistem informasi Desa di Kalurahan Mata Allo terdiri dari ketetapan waktu dengan sub bagian yang terdiri atas pelayanan dan disiplin masih perlu di tingkatkan oleh pemerintah Kalurahan Mata Allo. Selain itu ketepatan biaya dengan sub-sub bagian yang terdiri dari perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan masih dalam tahap proses perbaikan.

Penelitian di atas memiliki persamaan yaitu membahas tentang sistem informasi Kalurahan, penelitian di atas lebih menekankan pada penerapan sistem informasi Desa dalam membangun Kalurahan, sedangkan dalam penelitian ini menekankan tentang bagaimana strategi pemerintah Kalurahan dalam pengembangan sistem informasi Kalurahan.

F. Kerangka Konseptual

1. Strategi

Pengertian tentang strategi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah ilmu yang menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Kemudian dalam penelitian (Nippi dan M, 2019) bahwa, Strategi adalah rencana khusus dan saling hubungan dalam hal waktu dan ukuran. Menurut Kasmir (2013) strategi adalah Langkah yang harus dihadapi untuk mencapi suatu tujuan.

Strategi secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka Panjang organisasi, disertakan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai. Dalam strategi khusus dalam tindakan yang berdifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, startegi hampir selalu dimulai dari pada apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa strategi merupakan ilmu dan seni yang dipilih dalam menyiapkan suatu perencanaan yang cermat mengenai kebijakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam waktu dan ukuran tertentu untuk mencapai sasaran khusus atau rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi organisasi dengan

tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan Kepala Kalurahan yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Kaluraha sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara spesifik memberikan tugas pada pemerintah Desa yaitu penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pengelola rumah tinggal di Kalurahan nya, memenuhi kebutuhan rakyat banyak di Kalurahan nya, memenuhi kebutuhan rakyat banyak di Kalurahan nya serta megelola potensi-potensi lokal yang ada sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan manfaat dalam pembangunan masyarakat. Dalam Struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan di Kalurahan akan mempermudah kinerja dalam melaksanakan tugasnya

maka pelaksanaan suatu pemerintah Kalurahan diperlukan adanya kinerja yang jelas dalam rangka mempermudah pelaksanaan (Widjaja, 2001).

Penyelenggaraan pemerintah Kalurahan dilakukan oleh pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPD). Pemerintah Kalurahan adalah organisasi pemerintah Kalurahan yang terdiri dari:

- a) Unsur-unsur pimpinan, yaitu Kepala Kalurahan
- b) Unsur pembantu Kepala Kalurahan, yang terdiri dari atas:
 1. Sekretaris Kalurahan, yaitu unsur staf maupun pelayanan yang diketahui oleh sekretaris Kalurahan.
 2. Unsur pelaksanaan teknis, merupakan unsur pembantu kepala Kalurahan yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 3. Unsur kewilayahan, merupakan pembantu kepala Kalurahan diwilayah kerjanya seperti kepala dusun. (Hanif, 2011: 75)

Dalam Peraturan pemeritah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penerapan Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Widjaja (Budiarti, 2016:13) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan adalah subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, Kalurahan yang dipimpin

oleh kepala Kalurahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Kalurahan bertanggung jawab dalam Kepala Badan Permusyawaratan Kalurahan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Kalurahan adalah bagian terendah dari sistem pemerintahan Negara yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Sebagai bagian terendah, pemerintahan Kalurahan atau disebut juga dengan nama lain berhak diakui akan keberadaannya oleh bangsa sebagai wilayah yang otonomi dan berdiri sendiri. Pemerintahan Kalurahan, diselenggarakan oleh pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari kepala Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain. Sedangkan pemerintah Kalurahan dapat disimpulkan sebagai pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari kepala Kalurahan, sekretaris Kalurahan dan perangkat Kalurahan. pemerintah Kalurahan dituntut untuk bertanggung jawab serta patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengembangan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengembangan merupakan proses, cara, pertumbuhan pengembangan. Menurut WJS Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahwa pengembangan yaitu perbuatan menjadikan bertambah, berupa sempurna (pikiran, pengetahuan, dan sebagainya).

Pengembangan adalah proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan demografis. Tujuan pengembangan adalah peningkatan tingkat dan kualitas hidup penduduk, dan menciptakan atau perluasan pendapatan daerah setempat dan peluang kerja, tanpa merusak sumber daya lingkungan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002, pengembangan merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Dari uraian di atas pengembangan merupakan suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk, pengembangan dapat berupa proses, produk dan rancangan.

4. Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa merupakan salah satu kelompok dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah Kabupaten untuk masyarakat di Kabupaten yang keberadaannya di butuhkan atas berhubungan langsung dengan masyarakat Kabupaten. Pelayanan masyarakat Kabupaten adalah kegiatan pemerintah Kabupaten untuk melayani masyarakat yang

berhubungan dengan administrasi dan pembangunan yang ada di Kalurahan.

Menurut (Sutoro Eko, 2012 :19-20) Sistem Informasi Desa pada awalnya SIDESA hingga akhirnya menjadi Sistem Informasi Desa memiliki dua arti sempit dan luas. Dalam arti sempit Sistem Informasi Desa merupakan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintah Kalurahan dalam mendokumentasi data-data milik Kalurahan guna memudahkan proses pencariannya. Dalam arti luas sistem informasi Desa diartikan sebagai suatu rangkaian sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di komunitas. Dalam Setiap Kalurahan mempunyai sistem informasi seperti papan pengumuman dan komunikasi lisan namun data tersebut berkembang dalam ukurannya sehingga dibutuhkan fasilitas lain untuk mengelolah agar lebih konseptuan dan sistematis.

Adapun manfaat dari Sistem Informasi Desa, keberlangsungannya sistem informasi Desa (SID) tentunya sangat tergantung dari manfaat yang dirasakan masyarakat tentang program tersebut. Konsep dari sistem informasi Desa (SID) yaitu informasi yang diimplementasikan oleh perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat Kalurahan. Sistem informasi ini dibangun dengan dengan berbasis computer dan web, sehingga informasi ini dapat diakses oleh warga keberadaan SID menurut *Combine Rosource Institute* (Wihem Wau: 2012) didasarkan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Perencanaan pembangunan, dalam perencanaan pembangunan menghasilkan rangkaian proses pengambilan keputusan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Dengan adanya sistem informasi desa, maka Kalurahan memiliki pusat data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- b. Keterbukaan inovasi, sistem informasi Desa membuka budaya-budaya transparansi informasi yang selama ini tampak tertutup. Dengan adanya SID ini maka terjadi keterbukaan informasi yang memungkinkan peran dan status bukan lagi hambatan dalam berkomunikasi.
- c. Pendataan kemiskinan, dengan menggunakan model partisipatif maka kemungkinan dilakukan pendataan kemiskinan di tingkat Kalurahan yang lebih akurat
- d. Pelayanan publik, dengan adanya sistem informasi Desa (SID) ini maka data-data kependudukan, data keuangan Kalurahan maupun sumber daya Kalurahan akan tersimpan dalam databes. Dalam hal ini memungkinkan Kalurahan memberikan pelayanan yang lebih akurat dan cepat untuk permohonan surat-surat dari warga.

5. Governing

Dalam penelitian ini dipandu oleh perspektif Governing. Secara sederhana, Governing berkaitan dengan perbuatan pemerintah. *Governing* berbeda dengan *rulling*. Dalam buku yang berjudul

“*Rulling but not Governing*”, Steven A. Cook (2007: 12) menjelaskan bahwa dominasi militer dalam politik, atau bisa dikatakan bahwa kekuasaan dapat mengontrol seluruh lini atau ruang, tetapi tidak dapat memerintah (*governing*). Dari buku ini, kita dapat memahami bahwa *rulling* merupakan sebuah kondisi yang tidak menjadi pemerintah, dalam artian tidak mengatur dan mengurus. *Rulling* sendiri bisa dilakukan oleh siapapun dan mempunyai makna menguasai serta memiliki unsur dominasi. Sementara *governing*, secara ideal normatif melekat pada pemerintah dan mempunyai otoritas yang menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pengertian dasar, memerintah adalah penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah.

Dengan perbuatan pemerintah. *Governing* berbeda dengan *rulling*. Dalam buku yang berjudul “*Rulling but not Governing*”, Steven A. Cook (2007: 12) menjelaskan bahwa dominasi militer dalam politik, atau bisa dikatakan bahwa kekuasaan dapat mengontrol seluruh lini atau ruang, tetapi tidak dapat memerintah (*governing*). Dari buku ini, kita dapat memahami bahwa *rulling* merupakan sebuah kondisi yang tidak menjadi pemerintah, dalam artian tidak mengatur dan mengurus. *Rulling* sendiri bisa dilakukan oleh siapapun dan mempunyai makna menguasai serta memiliki unsur dominasi. Sementara *governing*, secara ideal normatif melekat pada pemerintah dan mempunyai otoritas yang menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam pengertian dasar, memerintah adalah adalah penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah

Governing diartikan memerintah dimana kata memerintah tidak lazim digunakan dalam kosakata pemerintahan. Kata yang lazim digunakan dalam pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan berarti ada otoritas yang mengatur dan mengurus. Otoritas tersebut merupakan tradisi pengaruh dari Belanda yang sangat kuat, yakni mengatur atau mengurus di mana pembuatan hukum dan administrasi mengabaikan pembuatan politik. *Governing* memiliki pendanan kata yang banyak sehingga sulit untuk dipahami, tetapi dalam pengertian Bahasa Indonesia kata baku dari governing adalah mengatur dan mengurus. Pada kata *governing* dalam keilmuan perlu dilakukan sebuah perbandingan dimana perlu dibandingkan dengan konsep-konsep kunci yang harus diadaptasi, misalnya: konsep *rulling* (menguasai), konsep governing (mengatur atau mengurus), konsep *ordering* (menata atau menciptakan) dan konsep *stiring* (mengarahkan)

Konsep *governing* dipahami sebagai upaya untuk mengatur atau mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum dan administrasi. Dalam Pembentukan hukum dan kebijakan adalah pembuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini merupakan fungsi ekstrasi, distribusi, proteksi dan koersi yang

dijalankan pemerintah atas negara, warga dan masyarakat (Sutoro Eko, 2021:12-13).

Fokus utama dalam *governing* sebagai basis konsep identitas mengandung proses politik, hukum dan administrasi. Sebab politik adalah sebuah kegiatan membuat keputusan hukum dan administrasi merupakan sebagai bentuk teknis eksekusi dan hukum dalam keputusan tersebut. Konsep *governing* tidak lepas dari kebijakan merupakan Tindakan utama pemerintah fungsi pemerintahan merupakan *protecting* atau melindungi bukan hanya *promoting*. Fungsi memerintah yang dijalankan pemerintah yang penting utama adalah *protecting* untuk *law* dan *order* serta *distributing* untuk *welfare* (kesejahteraan). Pemerintah mencakup proses politik, hukum, dan administrasi yang didukung dengan Teknik. Pemerintahan juga mencakup proses melahirkan kebijakan, hukum dan lain sebagainya.

Kebijakan yaitu jantung pemerintahan dan perbuatan pemerintah dalam memerintah atau dalam ilmu pemerintahan berbicara pemerintahan dari hulu sampai hilir serta secara komprehensif berbicara konteks, kontestasi, konstitutif, konten, konsisten, dan konsekuensi. Bahkan bisa juga bicara soal kontradiksi kebijakan. *Governing* merupakan arena kontestasi sehingga dibutuhkan pemerintah yang kuat, berdaulat, demokratis tidak diintervensi oleh elit, dan pihak lainnya tetapi lebih tegak lurus atau secara *responsible* mempertanggungjawabkan fungsi perlindungan (*protecting*) pendistr

ibusian (distributing) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sutoro Eko, 2021:12-14).

G. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulisan laporan penelitian ini dan agar lebih terarah serta berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu;

1. Kekuatan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui sistem Informasi Desa.
2. Partisipasi pemerintah Desa dalam memberikan informasi terhadap masyarakat dalam sistem informasi Desa di Kalurahan Jepitu.
3. Pengelolaan sistem informasi Desa (SID) untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya memuat asas-asas yang memberikan tuntutan terhadap penelitian atas dua empiris, oleh karena itu metode penelitian yang mencangkup semua proses penelitian. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatis merupakan penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang artinya peneliti memberikan uraian secara deskriptif mengenai gambaran obyek masalah yang diteliti kemudian memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari jenis penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang serta perilaku yang diamati.

2. Unit Analisis

Menurut Hamidi (2005: 75-76) menyatakan bahwa unit analisis merupakan satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa social seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subyek penelitian. Berdasarkan cara mengungkap unit analisis data dengan menetapkan kriteria responden tersebut, peneliti dengan sendirinya akan memperoleh siapa dan apa yang menjadi subyek penelitian. Dalam hal ini mencoba menemukan beberapa informan yang memberi informasi memadai Ketika aktivitas peneliti dalam pengumpulan data.

- a. Lokasi yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini oleh peneliti yaitu di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Peneliti tertarik dengan permasalahan tentang sistem informasi Desa karena ada beberapa informasi pada *website* yang tidak *update*.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini yaitu strategi pemerintah Desa dalam pengembangan sistem informasi Desa, di Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah desa, sistem informasi desa dan tokoh Masyarakat. Alasan memilih subjek penelitian di atas hal ini karena berhubungan dengan objek penelitian dan diharapkan mampu memberikan data dan informan terkait dengan permasalahan penelitian.

d. Informan

Informan adalah orang atau pihak yang mampu memberikan informasi tentang keadaan atau fenomena yang ingin diketahui peneliti. Informan dalam penelitian ini, dimana peneliti memilih informan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Kepala Desa (Lurah), Sekretaris Desa (Carik), Pengelola SID, dan Masyarakat Kalurahan Jepitu.

Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Narasumber Penelitian

No	Jabatan	Nama Narasumber
1.	Lurah	Sudarta, SLTA.
2.	Carik	Zanurih Rahman, S, pd.
3.	Operator SID	Heni Hursiati, Amk.
4.	Berita Acara SID	Rahayu Kembar Sari, Amk
5.	Tokoh Masyarakat	Prasetyo
6.	Tokoh Masyarakat	Sugiyanto
7.	Tokoh Masyarakat	Yoganita Cahaya
8.	Tokoh Masyarakat	Rahayu Ningsih

(Sumber Data: Data Olahan 2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukan narasumber yang terlibat dalam penelitian ini memahami dan terlibat dalam kegiatan dan pengelolaan dan pemanfaatan SID.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, (Moleong, 2003:33). Observasi yang disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan permusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Maka mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi ini dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu observasi non sistematis dan observasi sistematis. Observasi nonsistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrument pengamat.

Sedangkan observasi sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamat.

Dalam observasi ini, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap strategi pemerintah Kelurahan dan pengembangan sistem informasi Kelurahan di pemerintah Kelurahan. Observasi ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi Kelurahan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh data serta informasi dari terwawancara (Arikunto, 1993:126). Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang terkait dengan tema penelitian baik dengan sekretaris Kelurahan, kasi pelayanan, tim pengelola sistem informasi Desa, dan tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen tertulis berupa profil Kelurahan Jepitu, sejarah Kelurahan dan APBDesa.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Analisis kuitatif tertuju pada pemecahan masalah saat sekarang melalui cara menganalisa dan klasifikasi penyelidikan dengan berbagai jenis penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini analisis menurut Miles dan Humberman mencangkup beberapa Langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015:337-345).

1. Redulsi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi pemfokusan, penyerdehanaan dan abstraksi data dari filenote. Reduksi data adalah bagian dari proses Analisa yang mempertegas, memperdendek, membuat focus, membuat hal-hal yang tak penting dan mengatur data sedemikian rupa, sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Di dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat (catatan lapangan), bagan dan hubungan antar kategori.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknis analisis kualitatif yang dapat digunakan untuk mengambil

Tindakan, penarikan kesimpulan yaitu hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil Tindakan.

BAB II

PROFIL KALURAHAN JEPITU KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kalurahan Jepitu

Kalurahan Jepitu merupakan salah satu Kalurahan yang secara administrave kewilayahan berada di Kapanewon Girisubo kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan ini berjarak 5 km dari ibu kota kapanewon, 40 Km dari ibu kota Kabupaten, dan 80 dari ibu kota Provinsi. Kalurahan ini termasuk Kalurahan yang cukup asri, penduduknya pun masih mempercayai dan menerapkan kebudayaan-kebudayaan dari pada leluhur mereka. Walaupun begitu masih banyak orang yang tidak mengetahui asal usul des aini bahkan banyak orang yang beranggapan bahwa nama Kalurahan ini diambil dari pada kepanjangan Jepitu (berderet tujuh) sedangkan menurut pamong Kalurahan, nama jepitu berasal dari kata 'Jepitu (berderet tujuh).

Konon, leluhur mereka warga Jepitu ada seorang yang sangat sakti mandragauna, Namanya Mbah Gusti Wari. Mbah Wora Wari inilah yang menyelamatkan warga kampung dari banyak serangan, asal muasal kata pitu (tujuh) pun berasal dari legenda ini. Misalnya saat musuh mereka usir ke pantai, bahkan saking saktinya Mbah Wora Wari mengubah Jong (kapal) musuh menjadi batu dengan pitu (tujuh) bambu yang dilemparkan. Legenda ini terkait dengan beberapa batu karang yang ada di kedung prahu (pantai wediombo) yang dianggap sebagai petilasan (tempat keramat),

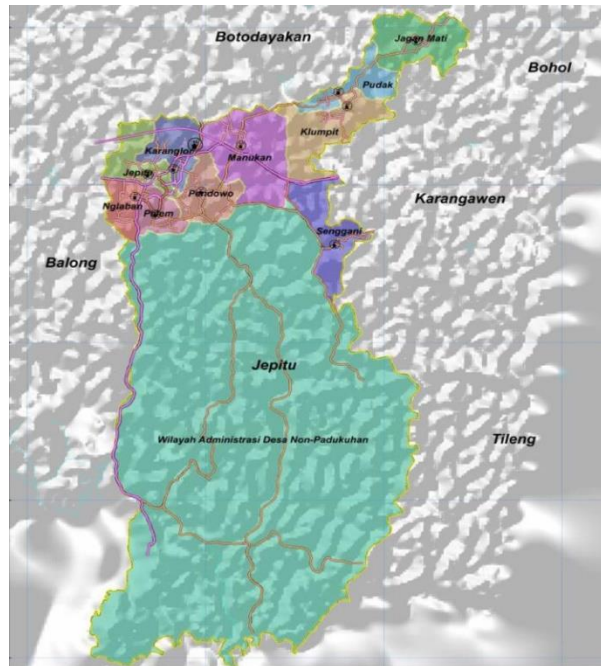
karena beberapa karang yang dianggap bentuknya mirip dengan kerangka perahu. Atau lain, tentang kesaktian mbah Wora Wari merubah tujuh buah tongkat menjadi tujuhbuah pohon Joa. Wit Joa Pitu (pohon Joa berderet 7).

B. Kondisi Geografis Kalurahan Jepitu

Kalurahan jepitu adalah bagian dari Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapanewon Girisubo terdiri atas delapan Kalurahan yaitu: Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Pucung, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Jerukwudel, Kaurahan Jepitu, dan Kalurahan Balong.

Luas wilayah kalurahan Jepitu sebesar 1673,4 Ha. kalurahan Jepitu termasuk wilayah terluas ke 2 setelah Kalurahan Tileng. Jarak Kalurahan Jepitu dengan pusat kota Wonosari sejauh 32,3 Km, atau jika ditempuh dengan sepeda motor selama kurang lebih 1 jam. Wilayah Jepitu sangat dekat dengan perbatasan Pracimantoro, Jawa Tengah, dan juga pantai yang membentang dengan perairan Australia. Berikut adalah gambar peta Wilyah Kalurahan Jepitu:

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kalurahan Jepitu



(Sumber data peta wilayah Jepitu tahun 2021)

Kalurahan Jepitu mempunyai 10 (sepuluh) padukuhan antara lain: Padukuhan Karanglor, Padukuhan Jepitu, Padukuhan Ngaban, Padukuhan Pendowo, Padukuhan Manukan, Padukuhan Pelem, Padukuhan Senggani, Padukuhan Klumpit Padukuhan Pudak, dan Padukuhan Janganmati.

Jarak dari kantor Kapanewon dengan Kalurahan Jepitu sejauh 7 Km, sehingga untuk menjangkau layanan masyarakat yang diperlukan tidaklah jauh. Di Kalurahan Jepitu juga sudah ada layanan perbankan, Kesehatan, dan pasar. Hal ini yang memudahkan masyarakat Jepitu untuk tidak pergi jauh-jauh ke pusat Kapanewon untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Bahkan Kalurahan Jepitu disebut dengan “Kota Girisubo”, hal ini karena disini banyak warung-warung makan, tempat ngopi, kios-kios, dan lingkup sekolah. Sehingga anak-anak sekolah banyak yang

melakukan aktifitas disini. Jarak pantai Wediombo, Jungwok, Nampu, Sedahan, Greweng yang hanya jarak 5-7 Km dari Kalurahan Jepitu, membuat banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai-pantai tersebut banyak yang mampir ke warung-warung di Jepitu.

Kalurahan Jepitu termasuk kasan karst Gunung Sewu bagian selatan, sehingga memiliki banyak potensi wisata alam. Wisata alam berupa pantai di Kalurahan Jepitu ada 8 (delapan) pantai yang masing-masing mempunyai keunikan dan keindahan alam tersendiri, mulai dari pantau Wediombo, Greweng, Jungwok, Pulutan, Sedahan, Dadapan, Ngmbusan, dan Ngulasan. Benteng alam selain pantai yang dapat dinikmati yaitu dilirik oleh investor asing. Bahkan di beberapa tanah yan dekat dengan pantai, sudah banyak dimiliki oleh investor asing. Kalurahan Jepitu memiliki potensi yang biasa karena masuk dalam Geopark Gunung Sewu yang menyisakan gunung api purba yaitu Gnung Btur yang berada di perbatasan Kalurahan Jepitu dengan Kalurahan Balong.

Kalurahan Jepitu yang semakin berpotensi bisa dikembangkan baik dari jenis tumbuhan yang ada di sana seperti pohon bonsai yang harganya terbilang cukup mahal, kemudian jenis-jenis burung yang habitatnya masih asri di wilayah Jepitu. Pesona alam berupa bantuan arst, membuat kalurahan ini banyak memiliki gua vertikal dan horizontal yang masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Maka dari itu, kalurahan Jepitu ini banyak terdapat gua yang Sebagian terdapat aliran bawa tanah. Survei

awal yang di lakukan oleh pemerintah Kalurahan Jepitu tentang potensi gua yang ada di sana ditemukan data sebagai berikut ini:

Tabel 2.2

Tabel 2. 1 Daftar Gua di Kalurahan Jepitu

No	Nama	Lokasi
1.	Gua Pejo	Padukuhan Janganmati
2.	Gua Gunung Bromo	Perbatasan Kalurahan Karangawen
3.	Gua Pucang	Padukuhan Karanglor
4.	Gua Pulejajar	Padukuhan Nglaban
5.	Gua Pasung	Sawah Madaran
6.	Gua Pok Pinutuh	Sawah pinutuh
7.	Gua Greweng	Padukuhan Nglaban
8.	Gua Suruh Watu	Sawah Suruh Watu

(Sumber: Data Profil Kalurahan Jepitu)

Hasil dari survei yang telah dilakukan oleh pihak Kalurahan Jepitu, sebenarnya gua-gua tersebut memiliki potensi wisata dan daya Tarik tersendiri. Dari 8 (delapan) gua di atas itu tidak semuanya memiliki potensi air yang banyak, hanya da 2 gua saja yang mempunyai sumber mata air yaitu Gua Puring dan Gua Pulejajar. Bahkan ada yang tidak isa dimasuki oleh orang karena bantuan di dalamnya sangat tajam dan licin. Gua-gua yang ada di Kalurahan ini kebanyakan tedapat di area persawahan dan jauh dari pemukiman masyarakat.

Kalurahan Jepitu memiliki luas pertanian seluas 153,11 Ha leboh banyak dimanfaatkan untuk ditanami padi dan palawija. Lahan pertanian di Kalurahan Jepitu merupakan sawah tadah hujan, yang mana hanya mengandalkan hujan unutk mengairi saah mereka. Sehingga, untuk penanaman padi sendiri dalam 1 (satu) tahun hanya dapat dilaksanakan 1

(satu) kali saja. Kemudian, untuk Palawija seperti; Singkong, Cabai, dan Gembili, yang membutuhkan sedikit air, banyak diambilkan dari sumber mata air pada saat musim.

C. Kondisi Demografis Kalurahan Jepitu

Jumlah kepala keluarga di Kalurahan Jepitu adalah 1.524 KK dengan jumlah keseluruhan penduduk adalah 4.322 jiwa yang tersebar di 10 padukuhan, penyebaran penduduk di Kalurahan Jepitu cenderung tidak merata, karena keadaan wilayah yang terjal dan berbukit. Dengan luas wilayah 85.00 Ha.

1. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.3

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kalurahan Jepitu berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah jiwa	Persentase (%)
1.	Laki -laki	2.142	49,57
2.	Perempuan	2.179	50,03
	Total	4.321	100

(Sumber data Kalurahan Jepitu sem 1 tahun 2021)

Berdasarkan tabel 2.3, dapat kita simpulkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir sama. Persamaan gender dan peran perempuan sangat diusahakan di Kalurahan Jepitu dengan melibatkan dalam berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan bersama.

2. Jumlah Penduduk berdasarkan TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa, karena Pendidikan yang berkualitas dapat menentukan kualitas dari pembangunan. Melalui Pendidikan, maka generasi manusia yang berkualitas dapat terlahir dan juga dengan lahirnya manusia yang berkualitas maka dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan maksimal. Di Kelurahan Jepitu pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan selalu di upayakan agar terpenuhi kebutuhannya. Berikut ini adalah jumlah penduduk Kelurahan Jepitu berdasarkan tingkat Pendidikan.

Tabel 2.4

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1.	Tidak sekolah/belum sekolah	813	18,81
2.	Tidak Tamat SD	406	9,40
3.	Tamat SD	1.558	36,06
4.	Tamat SLTPA	816	18,88
5.	Tamat SLTA	627	14,51
6.	DI/DII	5	0,12
7.	DIII	25	0,58
8.	Starata I	65	1,50
9.	Starata II	5	0,12
10.	Strata III	2	0,04
	Total	4321	100%

(Sumber: Data Kelurahan Jepitu tahun 2021)

Berdasarkan tabel 2.4. dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang menempuh Pendidikan adalah 3.508 dari keseluruhan jumlah penduduk Kelurahan Jepitu yaitu 4.321, sedangkan untuk 813 penduduk lainnya belum atau tidak menempuh Pendidikan. Tingkat Pendidikan

penduduk Kalurahan Jepitu didominasi oleh tamat SD sebanyak 1.558 jiwa atau sebanyak 36,06%

3. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat membutuhkan suatu pekerjaan untuk menunjang perekonomian. Mayoritas masyarakat peKalurahan an bekerja dalam bidang pertanian, karyawan, dan perdagangan.

Tabel 2.5

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani /buruh tani	1.032	67,72
2.	Wiraswasta	99	6,50
3.	Buruh harian lepas	162	10,63
4.	Karyawan swasta	143	9,38
5.	PNS	19	1,25
6.	Pensiunan	11	0,72
7.	Mengurus rumah tangga	6	0,39
8.	Perangkat Kalurahan	19	0,25
9.	Tidak/belum bekerja	4	0,24
10.	Lain-lainnya	29	1,90
	Jumlah	1.524	100

(Sumber: Data Kalurahan Jepitu tahun 2021)

Berdasarkan tabel 2.5. dari 4.321 penduduk Kalurahan Jepitu yang teridentifikasi memiliki pekerjaan sebanyak 1.524 jiwa, sedangkan sisanya belum teridentifikasi jenis pekerjaannya yang terdiri dari pelajar dan lansia yang sudah tidak produktif lagi. Kalurahan Jepitu

didominasi oleh penduduk yang bekerja pada bidang pertanian dan buruh yaitu sebanyak jiwa dan 1.032 jiwa dan 162, hal tersebut didukung oleh leak kalurahan jepitu yang berada di pegunungan dan banyaknya tersedia lahan pertanian sehingga banyak penduduk yang Bertani. Untuk karyawan banyak merantau ke kota.

4. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Agama

Tabel 2.6.

Tabel 2. 5 Jumlah penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Islam	4,261	81,80
2.	Kristen	59	7,44
3.	Khatolik	-	10,41
4.	Hindu	-	0,18
5.	Bhuda	-	0,16
6.	Lainnya	2	0,02
	Total	4.321	100%

(Sumber: Data Kalurahan Jepitu tahun 2021)

Berdasarkan tabel 2.6. dapat diketahui bahwa penduduk Kalurahan Jepitu menganut kepercayaan yang cukup beragam dan didominasi oleh penduduk yang beragama islam, walaupun demikian penduduk Kalurahan Jepitu tetap rukun dan saling menghargai antara kepercayaan yang satu dengan yang lainnya.

D. Keadaan Ekonomi dan Kesejahteraan Kalurahan Jepitu

Kalurahan Jepitu adalah salah satu kalurahan yang menjadi pusat ekonomi yang ada di Kapanewon Girisubo, karena termasuk komplek pasar yang terbesar di wilayah tersebut. Kios-kios mulai dari pakaian

hingga took keontong banyak ditemu di Kallurahan Jepitu. Wilayah Jepitu termasuk Kawasan Pendidikan dari mulai Pendidikan anak usia Dini (PAUD) hingga sekolah menengah kejurusan (SMK) ada di Kalurahan Jepitu, oleh karena itu banyak aktivitas Pendidikan dan perekonomian yang ada di Kalurahan Jepitu.

Kalurahan Jepitu merupakan wilayah yang sangat terdekat dengan jalur menuju pantai Wediombo, pantai Jungwok dan sekitarnya, tak salah jika usaha-usahan dan pertokoan banyak terdapat di wilayah Jepitu. Dalam kondisi ekonomi masih ada warga yang kurang mampu, hal itu bisa dilihat dari daftar warga masyarakat Kalurahan Jepitu sebagai berikut yaitu:

Tabel 2.7

Tabel 2. 6 Jumlah data warga kurang mampu di Kalurahan Jepitu

No	Padukuhan	Jumlah
1.	Janganmati	10 KK
2.	Pudak	38 KK
3.	Klumpit	53 KK
4.	Senggani	15 KK
5.	Manukan	40 KK
6.	Pendowo	90 KK
7.	Karanglor	46 KK
8.	Jepitu	36 KK
9.	Nglaban	38 KK
10.	Pelem	19 KK

(Sumber: DTKS kalurahan Jepitu tahun 2021)

Data tabel diatas yang dimaksud adalah warga kurang mampu di kalurahan Jepitu sebesar 23,6% dari 1519 kepala Keluarga yang ada di kalurahan tersebut masyarakat yang kurang mampu di kalurahan Jepitu dapat bantuan air bersih baik dari pihak kalurahan jepitu atau donator lainnya.

E. Keadaan Sosial Budaya

Kondisi sosial masyarakat Kalurahan Jepitu sangatlah terbuka bagi kedatangan orang baru yang masuk kesana bahkan keluar daerah. Dalam hal ini terlihat dari adanya masyarakat Jepitu yang merantau keluar daerah seperti Jakarta, Kalimantan dan Sumatra. Keterbukaan masyarakat Jepitu sangat membantu dalam pembukaan dan peresmian bantuan oleh pihak luar untuk pembangunan sarana prasarana pengangkatan air di Pulejajar yang dilakukan secara gotong royong.

Dalam budaya gotong royong atau biasa masyarakat menyebutnya dengan “gugur gunung”. Budaya yang masih ada di Kalurahan Jepitu yaitu sedekah laut atau “ngalangi” bentuk ucapan syukur kepada tuhan atas hasil panen, kemudian ada bersih Kalurahan “Rasulan”, ada juga “kirim dowo” yaitu mensyukuri hasil ternak yang diberikan. Budaya-budaya ini masih sangat dipertahankan oleh masyarakat Jepitu, terutama “gugur gunung” dalam hajar orang menikah, membongkar rumah, dan panen raya. Bahkan dalam tradisi “gugur gunung” terbesar selama ini yaitu pada saat pengangkatan air di Pulejajar, pemasangan pipa, dan pembangunan bak-bak penampungan air sehingga dinamai dengan “gugur gunung pulejajar jilid 1”. Masyarakat Kalurahan Jepitu masih sangat menjunjung budaya nenek moyang mereka, terlihat bahwa budaya-budaya tersebut masih dipertahankan sampai sekarang.

F. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yaitu fasilitas atau perlengkapan yang disediakan untuk mempermudah pekerjaan masyarakat dan erat sekali aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Untuk sarana dan prasarana Kalurahan Jepitu sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana mulai dari kesempatan, Pendidikan, peribadatan, sarana umum, transportasi dan lain-lain sudah mulai terbangun.

1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Keberadaan transportasi menjadi salah satu penyongkong kehidupan sehari-hari masyarakat Kalurahan Jepitu. Transportasi juga mendukung peningkatan kualitas hidup dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu, sarana transportasi merupakan sesuatu yang penting dan harus diusahakan oleh masyarakat, karena digunakan sebagai media perhubungan bagi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Kepada sarana dan prasarana di Kalurahan Jepitu sudah memadai, hampir seluruh warga sudah memiliki kendaraan roda dua bahkan beberapa penduduk sudah memiliki kendaraan roda empat, selain itu sudah tersedia akses antar pemukiman memudahkan warga dalam beraktivitas.

2. Prasarana Ibadah

Sarana Ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai symbol keberadaan pemeluk agama, sarana ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya fungsinya sarana ibadah di samping sebagai tempat peribadahan di harapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik.

Tabel 2.8.

Tabel 2. 7 Jumlah Sarana Ibadah

No	Jenis sarana ibadah	Jumlah
1.	Masjid	12
2.	Mushola	9
3.	Gereja	2

(Sumber: Data Kalurahan Jepitu tahun 2021)

Berdasarkan tabel 2.7. dapat diketahui bahwa penduduk Kalurahan Jepitu memiliki kepercayaan yang beragam sehingga jenis sarana peribadatnya beragam pula.

3. Sarana Air Bersih

Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah Air. Tidak hanya penting bagi manusia air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia. Iitnya karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk

Kalurahan Jepitu menggunakan air hujan dan PAM (Perusahaan Air Minum) dan membeli air gallon isi ulang.

4. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Mengingat pentingnya pelayanan Kesehatan bagi setiap penduduk, menjadikan sarana dan prasarana Kesehatan mempunyai peranan yang penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanann Kesehatan. Demi menunjang segala aspek dalam Kesehatan, maka perlu adanya pembangunan sarana atau prasarana Kesehatan, di Kalurahan Jepitu terdapat sarana Kesehatan berupa 10posyandu yang tersebar di 10 padukuhan dan 2 balai pelayanan masyarakat/poliklinik, sedangkan untuk puskesmas terletak di Kalurahan lain.

5. Sarana Lembaga Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terecana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif dapat mengembangkan potensi dirinya. Keberhasilan proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak factor, salah satunya adalah tersediannya prasarana yang memadai. Lembaga Pendidikan Kalurahan Jepitu ada dari taman kanak-kanak (TK), sekolah Dsar (SD), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTPA), jumlah Lembaga Pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9

Tabel 2. 8 Jumlah sarana Pendidikan

No	Jenis sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD	2
3.	SLTP	1
4.	SLTA	1

(Sumber: data primer kalurahan jepitu 2021)

Berdasarkan tabel 2.8 dapat diketahui bahwa untuk kelembagaan Pendidikan mulai dari tingkat TK sampai SLTPA sudah tersedia dikalurahan Jepitu, sehingga penduduk setempat tidak kesulitan dalam meempuh proses Pendidikan. Sedangkan untuk melanjutkan Pendidikan untuk jenjang perguruan tinggi penduduk memilih untuk mendaftar perguruan tinggi yang ada di Kota Yogyakarta ataupun di kota lain.

G. Organisasi Pemerintahan Kalurahan

Dilihat dari administrasi, Kalurahan Jepitu dipimpin oleh kepala Kalurahan dan memiliki 10 (sepuluh) padukuhan, 10 (sepuluh) RW, dan 60 (enempuluh) RT. Kesepuluh padukuhan tersebut meliputi: Janganmati, Klumpit, Senggani, Manukan, Pendowo, Karanglor, Pelem, Nglaban, dan Jepitu.

Adapun struktur organisasi Pemerintahan Kalurahan Jepitu saat ini sebagai berikut:

Tabel 2.10

Tabel 2. 9 struktur organisasi Pemerintahan Kalurahan Jepitu

No	Nama	Jabatan	L/P	Pendidikan
1.	Sudarta	Kepala Lurah	L	SLTA
2.	Zanurih Rahman	Sekretaris Kalurahan	L	SPD
3.	Ayoga sukarjita	Kasi Pemerintahan	L	STM
4.	Supriyanta	Kasi Pelayanan	L	SMA
5.	Sukiyanta	Kasi Kesejahteraan	L	STM
6.	Suharjanta	Kaur umum dan tata usaha	L	STM
7.	Sukaja	Kaur perencanaan	L	SMA
8.	Suharja	Kaur Keuangan	L	SMA
9.	Irna Widayati	Kepala padaukuhan Jangganmati	P	SMA
10.	Sularna	Kepala padukuhan jepitu	L	SMA
11.	Ali Purwanto	Kepala padukuhan Klumpit	L	SMA
12.	Samingan	Kepala padukuhan Manukan	L	SMP
13.	Prastyo	Kepala padukuhan Nglaban	L	SMA
14.	Tukijan	Kepala padukuhan Pelem	L	SMA
15.	Kalimin	Kepala padukuhan Pendowo	L	SMA
16.	Agus Budiyanata	Kepala padukuhan Pundak	L	SMA
17.	Sukamdi	Kepala padukuhan Senggani	L	SMA

(Sumber: *Susunan Organisasi Pemerintahan Kalurahan Jepitu tahun 2021*)

Dalam Portal pelayanan publik adalah situs website penyedia layanan publik oleh pemerintahan. Pemerintahan yang melaksanakan pelayanan publik harus bertanggung jawab terhadap informasi yang diberikan. Portal pelayanan publik yang dimaksud adalah situs website Kalurahan yang berbasis internet yang memberikan informasi dan dokumentasi elektronik dari instansi terkait. Berikut ini adalah sekilas informasi yang sudah di update di website SID di Kalurahan Jepitu.

Gambar 1.2

Gambar 2. 2 Penyaluran BLT Dana Desa



(Sumber: wesite Kalurahan Jepitu tanggal update 11 Mei 2021)

Pada gambar di atas merupakan printscreen dari tampilan website yang dapat diakses di wesite Kalurahan Jepitu pada tanggal 11 Mei Tahun 2021. Kegiatan diatas untuk memberikan kemudahan akses informasi yang langsung terkait Kalurahan Jepitu. Dalam hal ini pemerintah Kalurahan Jepitu melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai dana Kalurahan (BLT -DD) Tahun 2021 Bulan 5. Penyaluarah BLT-Dana Kalurahan bulan kelima diberikan keluarga penerima manfaat BLT dana Kalurahan sebelum lebaran dimaksud agar dapat segera memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun lebaran pada kegiatan penyaluran BLT bulan 5. Tujuan diakses ke website kegiatan tersebut agar masyarakat jepitu mengetahui apa saja kegiatan yang di lakukan di

Kalurahan tersebut. Dalam hal tersebut pemerintah sangat mengutamakan masyarakat dalam mendapatkan akses yang baik dan dapat melihat informasi, dan di dalam SID ini juga terdapat informasi terkait berita-berita seputar kalurahan dan hal tersebut sangat penting bagi masyarakat. Dalam pemanfaatan SID dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat yang berbasis online ini sangat membantu warga untuk mendapatkan informasi dan berbagai pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan, warga cukup menggunakan media sosial, maka akan memperoleh respon dari tangkapan Sistem Informasi Kalurahan (SID).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan pengamatan langsung membahas dan menganalisis hasil penelitian. Maka dalam bab ini penelitian memberikan kesimpulan sesuai dengan kajian tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Sistem Informasi Desa Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Pengembangan sistem informasi desa yang ada di Kalurahan Jepitu pada saat ini belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih kurangnya fasilitas pendukung seperti jaringan. Kurangnya jaringan di Kalurahan Jepitu membuat aktivitas yang berhubungan dengan sistem tidak berjalan dengan maksimal akan tetapi pemerintah Kalurahan Jepitu berupaya untuk memasang wifi yang di biayai oleh Kalurahan seperti berlangganan dengan provider (penyediaan jasa internet) sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan yang berhubungan dengan sistem informasi yang menggunakan jaringan internet dan berbagai kebutuhan lainnya.
2. Masih banyak masyarakat Kalurahan Jepitu belum mengetahui adanya sistem Informasi desa akan tetapi pemerintah Kalurahan Jepitu memberikan penyuluhan dengan cara mempromosikan sehingga masyarakat juga bisa mengakses dan mengetahui terkait sistem informasi Kalurahan, Adapun sebelum memberikan

penyuluhan kepada masyarakat Pemerintah Kalurahan melakukan rapat seperti memberikan arahan kepada padukuhan sehingga padukuhan menyampaikan hasil rapat kepada masyarakat. Tidak hanya lewat rapat akan tetapi disampaikan juga melalui media sosial seperti *WhatsApp* agar masyarakat bisa mengetahui kegunaan sistem informasi itu sendiri.

3. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kalurahan Jepitu pada saat ini masih manual seperti Ketika ingin mengurus berbagai kebutuhan administrasi harus datang di kantor Kalurahan yang berkaitan dengan pelayanan, dengan adanya sistem informasi Desa ini dapat membantu pihak pemerintah Kalurahan Jepitu dalam memberikan pelayanan administrasi publik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan organisasi.
4. Pemerintah Kalurahan Jepitu dalam memberikan informasi tidak hanya melalui Sistem Informasi Desa akan tetapi dengan menyampaikan informasi melalui papan informasi dan spanduk yang di pasang di tempat yang strategis seperti memuat tentang kegiatan pemerintah Kalurahan, Keuangan Kalurahan, dan Informasi Kalurahan sehingga dengan pemasangan papan informasi secara cepat dan akurat tidak harus dengan membuka *website* Kalurahan.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan atau hasil kajian pada uraian diatas, maka dibagian akhir penelitian mencoba memberikan saran kepada semua pihak yang terkait dan berkepentingan pada Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Pengembangan teknologi informasi atau sistem informasi Kalurahan sangat di butuhkan oleh Kalurahan Jepitu demi memenuhi kebutuhan administrasi serta untuk mendapatkan informasi yang baik, penerapan sistem informasi mengenai pengembangan terhadap masyarakat harus diterapkan secara optimal agar sistem yang ada saat ini dapat lebih dikembangkan lagi dan dapat memaksimalkan peluang yang ada baik terhadap sarana maupun sarana prasarana, yang ada di Kalurahan Jepitu dengan sangat baik dan dapat mengoptimalkan sistem kerja secara maksimal.
2. Diharapkan pemerintah Kalurahan Jepitu dalam memberikan pelayanan harus ditingkatkan lagi dalam menerapkan sistem informasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat dengan meningkatkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem, pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas karena dimasa mendatang pelayanan administrasi

akan melibatkan sistem. Pemerintah Kalurahan Jepeitu harus tepat waktu dalam pada saat memberikan pelayanan, pemerintah Kalurahan Jepitu juga harus lebih cepat dan akurat dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dan juga pemerintah Kalurahan harus teliti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa mengimbangi kekuatan dan peluang yang ada.

3. Pemerintah Kalurahan Jepitu perlu memberikan pelatihan bagi pengelola sistem informasi Desa, pemerintah Kalurahan seharusnya memberikan dukungan dan dorongan kepada pengelola sistem informasi Desa untuk selalu memberikan berita, artiker dan konten yang menarik serta pelatihan dalam pembuatan konten informasi yang baik.
4. Pemerintah Kalurahan Jepitu perlu untuk terus mengsosialisasi adanya sistem informasi Desa dan manfaatnya kepada masyarakat, serta tata cara dalam menggunakan sistem informasi Desa tersebut.
5. Pemerintah Kalurahan jepitu diharapkan selalu *update* dan data tentang potensi wisata terkini, supaya masyarakat merasa lebih puas denga isi informasi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afahni, W. N. (20203). Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) Guna Meningkatkan Goog Governance Di Kalurahan Gondosuli Kapanewon Gondang Kabupaten Tulungagung. *jurnal Praktis dan Dedikasi Sosial*, 3(2) 48-53.
- Ahmad, M. (2017) Inovasi Pelayanan Pemerintah Desa Melalui E-goverment (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kalurahan Penggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta)). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kalurahan Pembangunan Kalurahan Di Kalurahan Mata Alo Kabupaten Enrekang.
- Asyikin, A. F. (2015). Pengukuran TIngkat Kesiapan Kantor Pemerintah Desa Dalam Penerapan Masterplan Teknologi Informasi Dan Komnukasi (TIK) Perkantoran Kalurahan Menggunakan Kerangka Kerja Kobit. *Poros teknik*, 7 (2). 61-67.
- Asyikin, A. N. (2016). Masterplan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Kantor Pemerintah Kalurahan . *Poros Teknik*, 8(2) 61-67.
- Fitri, R. A. (2017). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Kalurahan Yang Baik (Good Governance) Berbasis TIK. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, 3(2). 99-105.
- Hamdani Hamid. (2013). Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia. *Pusatata Setia*, 125.
- Hartoyo, N. M. (2016). Upaya Membangun Sistem Informasi Desa Yang Bermakna. *Jurnal Komunikasi Ikatan Serjana Komunikasi Indonesia*, 1 (1).48-57.
- Hermanyanti, Y. (2022). Strategi Dinas Komunikasi dan Informasi Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Website di Kabupaten Ciamis.
- Majid., A. (2003). Perencanaan Pembelajaran . *Remaja Rosdakarya*, 23.
- Nilawati, E. (2019). Kecendrungan Isi Sistem Informasi Desa Kabupaten Gunung Kidul (Village Information System Content Trends In Gunungkidul Regency).
- Praseptiawan, M. N. (2021). Pelatihan Sistem Informasi Desa Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Perangkat Kalurahan Taman Sari. *Pengabdian Masyarakat*, 4(1). 521-528.
- Rozi, F. L. (2017). Pengembangan Website dan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika.*, 2(2).

Shomad, A. (2018). Implentasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Administarsi dan Kebijakan Publik*, 8 (2), 62-80.

Sulistyowati, F. D. (2013). Partisipasi Warga Terhadap Sistem Informasi Kalurahan . *jurnal ASPIKOM* , 2 (1), 579-588.

Sulistyowati, F. T. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) Untuk Mewujudkan Smart Village di Kalurahan Panggugarjo DIY (Utilization of System Informasi Kalurahan (SID) to Realize Smart Village In Kalurahan Panggunharjo, Sewon, Bantul, DIY). *Jurnal IPTEKKOM (Jurnal Pengetahuan dan Teknologi Informasi)*, 23(2), 213-226.

Susanto, B. d. (2016). Identifikasi Digital Literacy Untuk Mengukur Kesiapan Jurnalisme Warga. *Annual Research Seminar*, 2 (1), 33-38. Available At:

<http://ars.ilkom.unsri.ac.id>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik.

Sumber lain-lain

<https://digilibadmin.unismuh.ac.id> 16 Desember 2022

<file:///C:/Users/asus/Downloads/Perda%20Kabupaten%2010%20januari%202023>

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :

Usia :

Jenis kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Daftar pertanyaan untuk pemerintah kalurahann Jepitu:

1. Menurut bapak/ibu kemajuan apa yang sudah di rasakan oleh masyarakat dengan adanya sistem infromasi Desa?
2. Bagaimana sejarah pembuatan sistem informasi Desa yang ada di kalurahan Jepitu?
3. Apakah pihak kalurahan sudah mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem informasi Desa? Jika sudah apa dan jika belum kenapa?
4. Apakah ada petugas khusus yang mengelola sistem informasi Desa khususnya website?
5. Siapa penanggung jawab pengelola SID?
6. Menurut bapak/ibu apakah pemerintah Kalurahan telah melakukan sosialisasi kepada mayarakat mengenai sistem informasi Desa?
7. Apa harapan kedepan dengan adanya SID?
8. Apakah ada dampak dari sistem informasi des aini untuk masyarakat?
9. Apakah ada hambatan yang menjadi kendala untuk saat ini?
10. Bagaimana pemanfaatan sistem informasi Desa untuk pelayanan kepada masyarakat?

Daftar pertanyaan untuk pengelola sistem Desa:

1. Apa kebijakan yang dilakukan pemerintah Desa terkait dengan Sistem Informasi Desa?
2. Bagaimana prosedur pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Desa?
3. Bagaimana proses kerjanya Sistem Informasi Desa?
4. Apakah ada kendala teknis seperti halnya fasilitas pada sistem informasi Desa?
5. Menurut bapak/ibu kemajuan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya sistem informasi Desa ini?
6. Menurut bapak/ibu dengan adanya website ini sudah membantu masyarakat?
7. Untuk keperluan apa saja pemanfaatan data yang ada dalam sistem informasi Desa?
8. Apakah pihak kalurahan sudah mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem informasi Desa? Jika sudah apa? Dan jika belum kenapa?
9. Data apa saja yang ada dalam sistem informasi Desa?
10. Darimana bapak/ibu melihat tingkat kepuasan masyarakat dalam menggunakan sistem informasi Desa?
11. Informasi apa yang dapat diakses dari sistem informasi Desa?

Daftar pertanyaan untuk masyarakat kaluarah Jepitu:

1. Menurut bapak/ibu/saudara bagaimana sikap pemerintah Kalurahan dalam merespon kalurahan dari masyarakat pengguna SID?
2. Apa harapan kedepan dengan adanya sistem informasi Desa ini?
3. Menurut bapak/ibu/saudara apakah sarana online kalurahan Jepitu sudah membantu? Kalau sudah apa dan kalau belum kenapa?
4. Menurut bapak/ibu/saudara bagaimana dengan sistem informasi Desa yang ada disini?
5. Apakah bapak/ibu/saudara pernah tahu atau pernah mengikuti dalam sosialisasi informasi Desa?

6. Apakah bapak/ibu/saudara sudah mengetahui adanya sistem informasi Desa di Kalurahan Jepitu? Darimana bapak/ibu/saudara mengetahuinya?
7. Menurut bapak/ibu/saudara apa manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya sistem informasi Desa?
8. Apakah bapak/ibu/saudara merasa puas dengan adanya sistem informasi Desa?
9. Menurut bapak/ibu dalam pendapatan pelayanan sistem informasi Desa apakah lebih baik *online* atau *offline*?

LAMPIRAN

FOTO BERSAMA INFORMAN

Wawancara bersama Pak Sudarta yang merupakan Lurah di Kalurahan Jepitu.
Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 8 Februari 2023



Wawancara bersama pak Rahman yang merupakan Sekretaris Kalurahan Jepitu.
Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 8 februari 2023



Wawancara bersama ibu Heni yang merupakan Operator SID Kalurahan Jepitu.
Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 8 february 2023



Wawancara bersama Ibu Sari yang merupakan Berita acara SID Kalurahan Jepitu.
Wawancara dilakukan pada tanggal 8 february 2023



Wawancara bersama pak Prasetyo yang merupakan masyarakat Kalurahan Jepitu.
Wawancara dilakukan pada tanggal 13 februari 2023



Wawancara dengan Pak Sugi yang merupakan masyarakat Kalurahan Jepitu.
Wawancara dilakukan pada tanggal 18 februari 2023



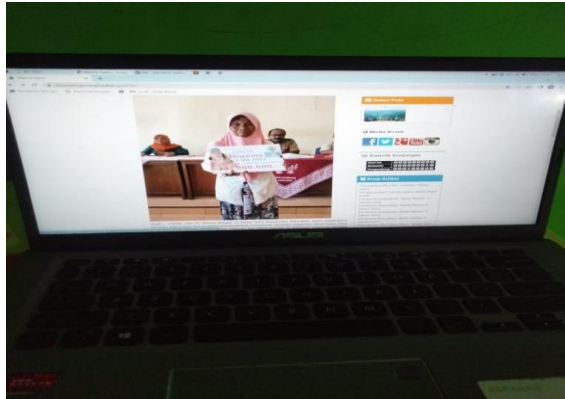
Wawancara bersama ibu Yoga yang merupakan masyarakat Kalurahan Jepitu.
Wawancara pada tanggal 18 februari 2023



Wawancara bersama ibu Rahayu yang merupakan masyarakat Kalurahan Jepitu.
Wawancara pada tanggal 18 februari 2023



Pengunduhan berita ke website Kalurahan Jepitu pada tanggal 14 april 2023.



Papan informasi Kalurahan Jepitu. Dokumentasi pada tanggal 14 April 2023



Website Kalurahan Jepitu



Kalurahan Jepitu
Kapanewon Girisubo
Kabupaten Gunungkidul
Jln. Botodayaan No. 03, Jepitu, Girisubo,
Gunungkidul D.I. YOGYAKARTA 55883

